

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2025, Kota Surakarta mengalami **deflasi sebesar 0,35% (mtm)**. Laju inflasi tahun kalender sebesar -0,35% (ytd), dan laju inflasi tahunan sebesar 1,25% (yoy). Tingkat inflasi bulan Oktober Kota Surakarta menjadi yang terendah di Jawa Tengah.
2. Pada bulan Februari 2025, Kota Surakarta mengalami **deflasi sebesar 0,73% (mtm)**. Laju inflasi tahun kalender sebesar -1,07% (ytd), dan laju inflasi tahunan sebesar 0,09% (yoy). Tingkat inflasi bulan November Kota Surakarta menjadi yang terendah di Jawa Tengah.
3. Pada bulan Maret 2025, Kota Surakarta mengalami **inflasi sebesar 1,31% (mtm)**. Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,22% (ytd) dan laju inflasi tahunan sebesar 0,76%.

TPID Kota Surakarta terus berkomitmen untuk menjaga distribusi pasokan dan stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat dan diharapkan dapat menjaga capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai target sasaran inflasi Nasional.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pada bulan Januari 2025, deflasi utamanya didorong oleh sbb:**

Deflasi pada bulan Januari 2025 utamanya didorong oleh deflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil -0,96%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif listrik, hal ini sejalan dengan diberlakukannya diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya 2.200V ke bawah mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,17% dengan andil inflasi sebesar 0,50%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, pisang, dan semangka. Inflasi komoditas cabai didorong oleh menurunnya produktivitas akibat musim hujan serta telah selesainya periode panen pada beberapa daerah yang menjadi sentra. Selain itu, tingginya permintaan untuk cabai pada bulan Desember dan Januari meningkatkan tekanan inflasi komoditas ini.

2. **Pada bulan Februari 2025, deflasi utamanya didorong sbb:**

Deflasi pada bulan Februari utamanya didorong oleh deflasi pada kelompok perumahan,

air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (andil -0,77%) dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau (andil -0,15%). Komoditas yang memberikan andil deflasi pada bulan Februari adalah tarif Listrik, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, kacang panjang, pengharum cucian, sawi putih, buncis, dan terong.

- **Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** mengalami deflasi sebesar 7,96%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi terhadap kelompok ini adalah tarif listrik sebesar 1,88%, hal ini disebabkan oleh masih berlanjutnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 untuk pelanggan rumah tangga PT PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
- **Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** mengalami deflasi sebesar 0,61%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi terhadap kelompok ini adalah cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Pada bulan ini, komoditas cabai mulai mengalami deflasi seiring dengan pasokan cabai yang mulai tersedia dari beberapa daerah sentra serta menurunnya permintaan pasar terhadap komoditas pangan.

3. Pada bulan Maret 2025, inflasi utamanya didorong oleh sbb:

Inflasi pada bulan Maret utamanya didorong oleh inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (andil 0,80%), kelompok makanan, minuman dan tembakau (andil 0,37%), dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (andil 0,10%). Komoditas yang memberikan andil inflasi pada bulan Maret adalah tarif listrik, bawang merah, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, es, pepaya, dan sayur olahan.

- **Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga** mengalami inflasi sebesar 8,94%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap kelompok ini adalah tarif listrik. Inflasi ini didorong oleh kembalinya tarif normal sejalan dengan berakhirnya program diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% untuk daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA oleh PT PLN.
- **Kelompok makanan, minuman dan tembakau** mengalami inflasi 1,51%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap kelompok ini adalah bawang merah, beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Inflasi bawang merah didorong oleh menurunnya pasokan dari berbagai daerah sentra di Pantura, Brebes, Kendal, dan Grobogan akibat bencana banjir yang sempat melanda daerah tersebut. Selain itu, periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang berlangsung di bulan Maret mendorong permintaan terhadap berbagai komoditas *volatile food*.
- **Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran** mengalami inflasi sebesar 0,72%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap kelompok ini adalah nasi dengan lauk, es, sayur olahan, dan mie. Inflasi pada kelompok ini merupakan *second-round effect* dari inflasi kelompok *volatile food*. Selain itu, periode Ramadhan mendorong permintaan terhadap makanan jadi akibat meningkatnya usaha kuliner di Kota Surakarta.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti zoom **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri** setiap minggu dilanjutkan dengan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta.
2. **Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** Kota Surakarta untuk membahas kondisi inflasi Kota Surakarta yang dilaksanakan setiap hari Senin setelah zoom bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
3. Melakukan **Pemantauan dan Update Harga** Pasar Legi, Pasar Gede, dan Pasar Nusukan melalui aplikasi SiHati dan SP2KP. Pantauan pada 3 pasar ini dilakukan karena merupakan pasar pantauan BPS untuk penetapan tingkat inflasi. Pemantauan harga dilaksanakan setiap hari sehingga memungkinkan tindakan intervensi yang cepat apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan.
4. Melaksanakan **High Level Meeting** dalam rangka menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dipimpin oleh Wali Kota Surakarta sisa periode 2021-2025, Bapak Teguh Prakosa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Triwulan IV Tahun 2024, mendiskusikan potensi masalah menjelang Idul Fitri, serta menetapkan langkah yang perlu dilaksanakan oleh TPID. Beberapa langkah yang disepakati untuk dilaksanakan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri antara lain adalah mendorong gerakan pangan murah/pasar murah/operasi pasar, melakukan sidak/monitoring harga dan ketersediaan bapakting, serta melakukan rapat koordinasi baik dengan tim TPID Kota Surakarta maupun dengan stakeholder eksternal.
5. Melaksanakan **Forum Komunikasi Distributor** menjelang HBKN Idul Fitri dipimpin oleh Wali Kota Surakarta periode 2025-2030, Bapak Respati Achmad Ardianto. Kegiatan dimaksudkan untuk membangun jaringan koordinasi dengan distributor bapakting di Kota Surakarta serta mendapatkan informasi berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Distributor sehingga dapat diberikan solusi dan langkah strategis yang tepat.
6. **Monitoring Harga dan Ketersediaan Bapakting** dilaksanakan secara rutin oleh TPID Kota Surakarta bersama dengan Forkopimda Kota Surakarta dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penyebab perubahan harga maupun masalah pada pasokan serta memberikan dampak positif terhadap psikologis penjual dan pembeli dengan kehadiran Pemerintah. Pada 4 Maret 2024, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala BI Solo, serta TPID Kota Surakarta melaksanakan sidak di Pasar Gede dan Pasar Legi sebagai pasar pantauan BPS.
7. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri serta rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2024, TPID Kota Surakarta melanjutkan pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah** baik di tingkat Kota maupun di 54 Kelurahan. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah terbukti dapat membantu menekan tingkat inflasi dan mendorong daya beli masyarakat Kota Surakarta.
8. Dalam rangka menghadapi HBKN Idul Fitri, TPID Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan melaksanakan **Operasi Pasar** di 10 Kelurahan bekerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Komoditas yang dipasarkan adalah Minyakita, beras premium, gula pasir, tepung terigu, dan garam.
9. Mendorong **gerakan office dan urban farming** mengingat Kota Surakarta bukan merupakan Kota penghasil komoditas pangan. Selain dilaksanakan di beberapa OPD, gerakan ini juga dilaksanakan oleh 90 Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani yang telah mendapatkan SK dan dibina langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Selain rutin memberikan penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta juga memberikan fasilitasi berupa bibit dan media tanam

untuk mendorong kegiatan ini.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2025, Kota Surakarta menjadi daerah dengan tingkat inflasi bulanan terendah ke tiga setelah Kabupaten Rembang (1,28%) dan Kudus (1,29%) serta lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,43% dan Nasional sebesar 1,65%, hal ini menunjukkan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta dilaksanakan dengan baik.
2. Kota Surakarta bukan merupakan daerah produsen pangan sehingga perlu mendorong upaya seperti gerakan menanam. Pada triwulan I, gerakan menanam masih belum berjalan dengan optimal sejalan dengan periode Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri sehingga perlu kembali dilakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan ini.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan langkah pengendalian inflasi utamanya untuk pengendalian inflasi kelompok *volatile food* dengan mendorong pelaksanaan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan pasar murah. Berdasarkan data tingkat inflasi pada triwulan I, kegiatan ini membantu menekan tingkat inflasi serta membantu menjaga daya beli masyarakat Kota Surakarta utamanya selama periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
2. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan setiap hari Senin untuk meningkatkan pelaksanaan gerakan menanam. Perlunya penerbitan Surat Edaran untuk mendorong kembali gerakan *urban farming* dan *office farming* pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Mengingat Kota Surakarta bukan merupakan daerah penghasil pangan, gerakan *urban farming* di masyarakat diharapkan dapat membantu menekan inflasi kelompok *volatile food* serta meningkatkan ketahanan pangan keluarga.